



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Peran Uni Afrika (AU) dalam Menangani Konflik di Burundi (April
2015 - Januari 2016)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Eriana Marta Erige

2016330010

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Peran Uni Afrika (AU) dalam Menangani Konflik di Burundi (April
2015 - Januari 2016)**

Skripsi

Oleh

Eriana Marta Erige

2016330010

Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe, M. S.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu
Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Eriana Marta Erige
Nomor Pokok : 2016330010
Judul : Peran Uni Afrika (AU) dalam Menangani Konflik di Burundi (April
2015 - Januari 2016)

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang jenjang Sarjana
Bandung, 22 Juli 2020

Pembimbing,

Dr. Atom Ginting Munthe, M. S.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Ratih Indraswari, S. IP, M. A.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Eriana Marta Erige
Nomor Pokok : 2016330010
Judul : Peran Uni Afrika (AU) dalam Menangani Konflik di Burundi (April 2015 - Januari 2016)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 29 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

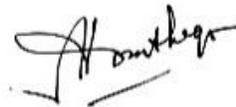
Ketua sidang merangkap anggota

I'dil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

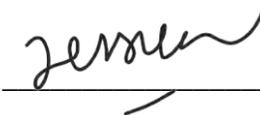
Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe

: 

Anggota

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eriana Marta Erige
NPM : 2016330010
Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Peran Uni Afrika Dalam Mengatasi Konflik di Burundi (April 2015 – Januari 2016)

Dengan ini menyatakan bahwa proposal rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung,



Eriana Marta Erige

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan bimbingan Nyalah penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Peran African Union (AU) dalam Menangani Konflik di Burundi (April 2015 - Januari 2016)”. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Atom Ginting Munthe selaku dosen pembimbing yang bersedia membantu penulis dengan meluangkan waktu dan menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa peran AU dalam menangani konflik di Burundi dan diajukan sebagai pemenuhan kelulusan mata kuliah Skripsi di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman terkait sebuah isu internasional. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini.

Bandung, Juli 2020

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini sudah melewati perjalanan yang sulit dan melelahkan hingga akhirnya bisa selesai, di tengah pandemi pula. Tidak dapat dipungkiri, semuanya tidak bisa saya lewati tanpa dukungan dari banyak pihak. Ucapan terima kasih dan penghormatan tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai sejak 4 tahun lalu ketika saya masih bergelut dengan mata kuliah PIHI dan yang penyertaannya tidak pernah berkurang sedikitpun hingga akhirnya nama saya ditambahi gelar sarjana di belakangnya. Saya bersyukur punya Tuhan yang hebat, lebih hebat dari semua pergumulan, sakit hati, *homesickness*, kesedihan, depresi yang saya rasakan selama melalui studi di kampus ini.

Selebihnya, teruntuk orang-orang yang paling saya sayangi:

- Terima kasih Papa dan Mama untuk ribuan doa yang dinaikkan, pengorbanan bekerja bahkan hingga di usia lanjut, dan yang terutama kepercayaan yang sudah diberikan selama empat tahun penuh kepada anak bungsunya yang nekad kuliah jauh dari orang tua. Semoga skripsi ini sedikit bisa memenuhi rasa bangga Papa dan Mama. Terima kasih juga untuk kakak satu-satunya yang sudah ikut mendukung dan menguatkan selama proses menempuh pendidikan di sini. Jangan marah-marah lagi ya, Kak☺ Adek sayang Papa, Mama, dan Kakak.

- Bang Atom – Terima kasih bang Atom sudah sabar menghadapi aku yang sering menghilang tanpa pernah sedikitpun berasumsi yang buruk. Bang Atom selalu khawatir dengan kondisi kesehatan saya yang dianggap jadi hambatan untuk bimbingan. Padahal saya memang sering malas saja. Terima kasih Bang Atom sudah membimbing hingga akhirnya skripsi saya selesai. Semoga Bang Atom sehat selalu.
- Hanna Maureen Losia Tuhumury, Ranessa Tri Julieta Nainggolan, Aquila Friskila Hosana Siregar -- teman-temanku yang *one phone call away* untuk diminta pertolongannya selama di Bandung. Walaupun kalian aneh dan berisik, aku sayang kalian.
- Tanya Lee Nathalia, Zico Oktavianus Sitorus, Andrian Dharmawan -- rindu hari-hari yang dihabiskan di apartemen Zico. Terima kasih sudah membawa banyak sukacita dan mendukung aku melewati hal-hal aneh dan menyebalkan di hidupku.
- Teman-teman Komsel: Arthur Immanuel Tamnge, Nadya C. Tamnge, Anaka, Ko Indo, Yonathan Ivan Varian, Indra, Jihan, dll – Terima kasih sudah mengajarkan bahwa terbuka kepada orang-orang yang benar adalah awal dari kesembuhan dan yang paling penting mendengar orang lain tidak setengah hati dan tanpa menghakimi masa lalu. Semoga kalian tidak muak dengar cerita-ceritaku.
- Miftahul Choir -- sampai jumpa di *moshpit* lainnya. Kalau tidak ketuaan.

- Bryan Dharmanta -- *thank you for the countless skype calls and conversations. You really keep me sane for these past 8 years. Miss you.*
- Media Parahyangan dan sekutu -- keluarga pertama di kampus. Hampir semua kemampuan yang saya miliki sekarang ini asalnya dari MP, mulai dari skill menulis hingga kemampuan untuk berkelakar dengan buruk. MP pada masanya (yang anggotanya angkatan sekitar 2013-2015) berhasil menjadi hal terbaik yang saya lalui di kampus. *Disclaimer:* orang-orang yang dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup anak-anak KKBM/Coop Space yang bukan anggota MP tetapi rutin menjadi partisipan teman nongkrong di MP.
- Komunitas Perempuan Medusa yang antek-anteknya sama seperti yang sudah disebut di atas. Dapat banyak pengalaman baru dari sini: bisa jadi pemantik diskusi, berjejaring, responsif terhadap isu sosial, berani melawan ketidakadilan, dan juga senang-senang santai. Di ujung kelulusan ini juga sempat terlibat melaksanakan program kelas pendidikan seksual yang bernama Inter(courses). Semoga niat baik dan kepedulian ini bisa dirasakan semua pesertanya hehe. Terima kasih Ranessa, Hanna, Miftahul, dan anggota-anggota lainnya. Maaf untuk adik-adik yang mungkin menunggu progres dari komunitas ini tapi tak kunjung ada karena orang-orangnya bodoh mengatur waktu dan bersembunyi di balik alasan sibuk skripsi ☹

- Unpar Radio Station -- mewadahi kegemaran saya berbicara yang lebih banyak tidak pentingnya daripada pentingnya dan sudah berhasil menguji selama satu periode menjadi chief Announcer yang mungkin hingga saat ini adalah pengalaman tersulit dan ter-hadeuh selama berorganisasi di kampus. Waktu itu juga pernah dikasih kesempatan untuk mewawancarai tokoh penting dari Australia tapi lupa nama ibunya siapa (maaf tapi terima kasih banyak URS, saya merasa keren sampai sekarang).
- Warta Himahi -- tempat di mana saya (akhirnya) bisa berteman dengan mahasiswa HI lainnya. Di sini pekerjaan saya menulis juga. Menyenangkan. Sempat mengasah kemampuan saya untuk kritis terkait fungsi media di kampus juga. Pada masanya. Sekarang sih sudah tua.
- Kelompok Prakdip – teman-teman Prakdip yang sabar dan pintar-pintar. Selama melewati masa-masa sulit Prakdip, saya selalu merasa ada kesejangan pengetahuan yang lumayan mencengangkan karena saya banyak linglungnya. Maaf ya sering menyulitkan dan kurang berkontribusi. Maaf juga keseringan tidak peka dalam mengucapkan selamat, baik itu ulang tahun, kelulusan, atau selamat-selamat yang lainnya. Saya senang kok dengan pencapaian kalian. *Output*-nya saja yang tidak tersampaikan dengan baik. Hehe.
- Warga reruntuhan Tamansari, komunitas perempuan, buruh, pembebasan Papua, serta sekutu lainnya -- tempat pertama saya melihat penindasan langsung terhadap rakyat, pelanggaran HAM, pelanggaran budaya patriarki,

operasi sistemik terhadap minoritas dan keegoisan negara. Bertemu teman-teman baru dengan perspektif baru. Panjang umur perjuangan.

- Kosan Pak Bubun -- kosan terbaik sepanjang masa. Memfasilitasi keinginan saya untuk punya kamar di lantai dua dengan balkon dan jendela yang besar. 10/10 direkomendasikan. Meningkatkan produktivitas dan meromantisasi kehidupan sehari-hari kalian!

- Knalpot, Spion, Sapi, NN (kelinci orange yang telinganya jatuh), Menggo, Eeyore, A, I, U, E, O, dan Jason Derulo. – selamanya akan jadi adek-adekku. *You were there when I was heartbroken. I love each and everyone of you. RIP* untuk sebagian karena beberapa sudah mati.

ABSTRAK

Nama : Eriana Marta Erige

NPM : 2016330010

Judul : Peran Uni Afrika Dalam Menangani Konflik di Burundi (April 2015 - Januari 2016)

Krisis politik di Burundi mencuat semenjak Pierre Nkurunziza mencalonkan kembali dirinya sebagai presiden Burundi untuk periode ketiganya. Kekecewaan rakyat akan buruknya pemerintahan Nkurunziza dan pelanggaran konsitusi yang dilakukannya menyebabkan munculnya konflik yang menghasilkan banyak korban dan pengungsi. Abainya pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan kepada rakyatnya ini kemudian meningkatkan urgensi bagi aktor internasional untuk turut campur tangan. Hal inilah yang mendorong AU sebagai organisasi internasional dengan mandat yang tercantum dalam konstitusinya untuk masuk dalam penanganan konflik tersebut. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana peran AU dalam menangani konflik di Burundi dengan menggunakan perspektif Clive Archer mengenai tiga peran organisasi internasional, yaitu instrumen, arena, dan aktor. Dalam membantu Burundi untuk menyelesaikan konflik, AU merespon konflik dengan melakukan upaya baik secara damai maupun berbasis militer, seperti negosiasi, mediasi, penyelidikan, pencarian fakta, serta percobaan pengerahan operasi militer.

Kata Kunci: Konflik, Uni Afrika, Pierre Nkurunziza, Burundi,

ABSTRACT

Nama : Eriana Marta Erige

NPM : 2016330010

Judul : The Role of African Union in Ceasing the Burundi Crisis (April 2015 – January 2016)

Many people had fled and been killed during the political crisis that took place in Burundi. The conflict was triggered by the election of Pierre Nkurunziza for his third term while he continued to lead poor governance. Due to its assumed severe condition and neglectful response coming from the government in handling the situation, the conflict gained international attention, including African Union (AU) as the closest organization in that region. This research seeks to study the role of AU in handling the conflict. The purpose of the research study is to describe how AU utilizes its authority and uses its mandate as given by its constitution to provide efforts in ceasing the conflict in Burundi. The writer used the roles of international organizations initiated by Clive Archer to explain AU's efforts which later form its roles in helping Burundi to end the conflict. In order to assist Burundi to solve the conflict, AU issued both peaceful and military conflict settlement such as negotiation, mediation, inquiry, fact-finding, and the attempt to deploy military operation.

Keywords: Conflict, African Union, Pierre Nkurunziza, Burundi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.2.1 Pembatasan Masalah	12
1.2.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1.3.1 Tujuan Penelitian	14
1.3.2 Kegunaan Penelitian	14
1.4 Kajian Literatur	14
1.5 Kerangka Pemikiran.....	17
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
1.6.1 Metode Penelitian	22
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	22

1.7 Sistematika Penulisan	22
BAB II.....	24
AU DALAM MEMAJUKAN NEGARA-NEGARA AFRIKA DALAM MENCIPTAKAN AFRIKA YANG DAMAI DAN AMAN.....	24
2.1 Latar Belakang dan Sejarah AU.....	25
2.2 Visi dan Misi.....	28
2.3 Peace & Security Council (PSC)	30
2.3.1 Program PSC.....	31
2.3.2 Peace Support Operations (PSOs).....	32
BAB III	34
PERAN UNI AFRIKA (AU) DALAM MENGATASI KONFLIK DI BURUNDI... 34	34
4.1 Tinjauan Umum Mengenai Konflik di Burundi.....	34
4.1.1 Gambaran Umum Burundi.....	34
4.1.2 Penyebab Konflik di Burundi	39
4.1.3 Kronologi Konflik di Burundi.....	41
4.2 Peran AU dalam Menangani Konflik di Burundi	46
4.2.1 Rencana Penanganan Konflik di Burundi oleh AU	46
4.2.2 Pemantauan Hak Asasi Manusia (HAM).....	53
4.2.3 Ancaman Pengerahan Operasi Militer	59
Grafik 4.1 Presentase Konflik di Burundi dalam Periode April 2015 – April 2016... 71	71
BAB IV	81
KESIMPULAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Presentase Konflik di Burundi dalam Periode April 2015 – April 2016... 71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik melekat pada semua kelompok masyarakat. Perbedaan kebutuhan, ide, kepercayaan, nilai, atau tujuan merupakan hal yang wajar dan telah ada sepanjang sejarah.¹ Pemahaman soal konflik dipengaruhi oleh cara berpikir seseorang terkait konflik itu sendiri. Ada yang percaya bahwa konflik merupakan hasil dari naluri manusia yang egois. Di sisi lain, konflik dianggap sebagai kondisi yang diperlukan guna mengembangkan individu dan kelompok dalam satu atau lebih kelompok masyarakat. Beberapa juga berpikir bahwa konflik adalah kejadian tidak normal dalam sebuah kehidupan sosial yang perlu dihindari.² Manusia dihadapkan dengan berbagai jenis konflik, baik individu, kelompok, dalam kelompok sosial di lingkungan sekitar, negara, bahkan internasional.

Secara luas, konflik memang tidak selalu ditandai dengan adanya kekerasan. Namun, konflik memiliki kecenderungan untuk mengarah kepada hal-hal yang sifatnya merusak. Saat ini, dunia berjuang dalam berbagai konflik, terutama konflik kekerasan

¹ Kazuhide Kuroda, "Conflict and Development," *World Bank Seminar Series*, diakses Februari 2019.

² Yael Ohana, ed., "Youth Transforming Conflict," *T-Kit 12*, Oktober 2012, <https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-12-youth-transforming-conflict>.

seperti krisis politik, konflik *intrastate*, perang sipil maupun konflik bersenjata. Banyak wilayah terus menderita akibat konflik-konflik kekerasan ini, termasuk benua Afrika.

Benua Afrika merupakan benua terbesar kedua dari keseluruhan tujuh benua di dunia. Afrika merupakan benua yang pada dasarnya berpotensi untuk berkembang karena berlimpah sumber daya alam yang memadai. Namun, setelah beberapa dekade merdeka, Afrika tetap menjadi benua yang paling tidak berkembang di dunia.³

Persoalan konflik kekerasan sering terjadi dalam kehidupan di Afrika. Ini mencakup Perang Biafran di Nigeria, Perang Kongo, perang Etiopia dan Eritrea, dan Genosida Rwanda. Sejak tahun 1990 hingga 2007, 88% kematian akibat konflik bertempat di Afrika, sementara 8% lainnya di Asia, 2% di Eropa, dan masing-masing 1% di Amerika Serikat dan Timur Tengah.⁴ Salah satu konflik kekerasan yang sedang berkembang di Afrika ialah berbasis politik. Sejarah diktator dan politik otoriter Afrika menyebabkan banyak sarjana menggambarkan benua ini dengan sebutan lemah, gagal, dan tidak sesuai dengan hukum.⁵ Realita di banyak negara Afrika sekarang menunjukkan adanya pemimpin-pemimpin negara yang menjabat lebih dari dua periode. Hal ini mengakibatkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan

³ Daniel Tetteh Osabu-Kle, "WHAT IS AFRICA?," <https://carleton.ca/africanstudies/wp-content/uploads/What-is-Africa.pdf>.

⁴ Gus Waschefort, "Africa and International Humanitarian Law: The More Things Change, the More They Stay the Same," *War and Security at Sea*, 2016, doi:10.1017/S1816383117000182.

⁵ Ebere Onwudiwe, "Africa's Other Story," *Current History*, (Mei 2002), <http://felipesahagun.es/wp-content/uploads/2014/05/Africas-other-story.pdf>.

konflik kekerasan dalam negara.⁶ Tidak dapat dipungkiri hal ini sering terjadi di negara-negara Afrika.

Kekuasaan untuk memerintah dapat digunakan untuk tujuan positif atau negatif. Ada penguasa yang menggunakan kekuasaan mereka untuk membangun kota, mempromosikan seni, atau memberi makan orang-orang miskin. Namun di sisi lain, ada pula penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan mengambil uang rakyat, mendukung perbudakan, dan bahkan melakukan pembunuhan massal. Menurut Lord Acton, kekuasaan cenderung bersifat korup dan kekuasaan absolut akan korup secara absolut pula.⁷ Hal ini dapat terlihat dari penyalahgunaan kekuasaan yang terlihat dari kekuasaan absolut dalam penempatan jabatan lebih dari periode yang seharusnya.

Pemindahan kekuasaan menjadi suatu faktor penting untuk memahami tren konflik yang ada di Afrika. Banyak negara-negara Afrika mengalami kesulitan dalam proses pemindahan kekuasaan setengah abad setelah kemerdekaannya. Pemimpin yang aktif berkecimpung dalam pergerakan nasional selama kemerdekaan secara otomatis mendapat pengakuan dan hak istimewa untuk langsung menjabat sebagai pemimpin negara. Hal ini juga turut mengakibatkan semakin banyaknya kemudian pemimpin yang memperpanjang periode menjabat lewat “kudeta konstitusi”. Kudeta konstitusi

⁶ Maryke Botha, "African Leadership and the Role of the Presidency in African Conflicts: A Case Study of Uganda's President Yoweri Museveni," (March 2012), https://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/20401/botha_african_2012.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

⁷ Diane Hart and Bert Bower, *Government Alive!: Power, Politics, and You* (Rancho Cordova, CA: Teachers Curriculum Institute, 2014).

adalah pengajuan amandemen undang-undang untuk memperpanjang periode menjabat presiden. Praktik ini semakin sering dilakukan pasca tahun 2000 ketika para pemimpin pos-kolonial mendekati akhir masa jabatan.⁸ Kudeta konstitusi ini kemudian menjadi salah satu alasan utama yang menunjukkan bagaimana buruknya pemimpin yang terus berkeinginan untuk berada di kursi kekuasaannya.

Sejarah menunjukkan bahwa semakin lama seorang pemimpin berkuasa, maka orientasi kepemimpinannya akan bergeser dari melayani negara menjadi ingin dilayani negara.⁹ Pemimpin akan menggunakan kekuasaannya dalam pengambilan keputusan melalui tatanan patron-klien. Akibatnya, kekuatan politik dan ekonomi, yang di dalamnya juga termasuk undang-undang sering dimonopoli oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu.¹⁰ Lemahnya bentuk kelembagaan politik di Afrika ini juga menjelaskan bagaimana Afrika masih menjadi salah satu wilayah yang tidak berkembang.

Kesulitan pada pemindahan kekuasaan di Afrika membuat kudeta menjadi satu cara kontekstual yang dapat dilakukan rakyat negara Afrika untuk menggulingkan rezim berkuasa. Setidaknya terdapat dua hingga empat upaya percobaan kudeta tiap

⁸ Council on Foreign Relations, "Africa's 'Leaders for Life' Syndrome," diakses Februari 2019, <https://www.cfr.org/background/africas-leaders-life-syndrome>.

⁹ Maryke Botha, "African Leadership and the Role of the Presidency in African Conflicts: A Case Study of Uganda's President Yoweri Museveni," (March 2012), https://scholar.sun.ac.za/bitstream/handle/10019.1/20401/botha_african_2012.pdf?sequence=2&isAlloved=y.

¹⁰ Aleksi Ylönen, "On Sources of Political Violence in Africa: The Case of "Marginalizing State" in Sudan," (2009), https://www.researchgate.net/publication/41392770_On_Sources_of_Political_Violence_in_Africa_The_Case_of_Marginalizing_State_in_Sudan/fulltext/0e60836ff0c46d4f0acc3474

tahunnya.¹¹ Selain itu, pada kenyataannya, peralihan kekuasaan di Afrika juga diisi dengan pemilihan umum. Namun, terlepas dari definisinya sebagai sebuah cara yang damai dan demokratis untuk memilih representasi politik, proses pemilihan umum yang berlangsung di negara-negara berkembang masih dipenuhi dengan konflik kekerasan.¹² Secara umum, konflik kekerasan yang terjadi pada pemilihan umum ini terjadi karena integritas selama proses pemilihan diragukan.¹³ Konflik ini merupakan salah satu bentuk dari konflik kekerasan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pemilihan umum yang sedang berlangsung. Konflik kekerasan ini juga bisa muncul sebagai respon negatif atas hasil pemilihan. Di Afrika sendiri, jumlah konflik kekerasan pemilihan umum mencapai 28% dan menduduki posisi kedua tertinggi setelah Asia. Angka ini merupakan akumulasi presentase konflik kekerasan pemilihan umum dari tahun 1990 hingga 2012.¹⁴

Adanya ancaman-ancaman seperti konflik kekerasan dan pelanggaran HAM berbasis kegagalan politik ini menunjukkan bahwa pemerintahan di negara-negara Afrika tidak mampu untuk menaungi rakyatnya dengan baik. Hal ini kemudian menjadi faktor politik utama yang mendasari dibentuknya Organization of African Unity

¹¹ Conflict Trends Project, "Conflict Trends in Africa, 1989–2017," (June 2018), [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Conflict Trends in Africa, 1946–2017, Conflict Trends Report.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Conflict%20Trends%20in%20Africa,%201946–2017,%20Conflict%20Trends%20Report.pdf).

¹² Ursula Daxecker dan Alexander Jung, "Mixing Votes with Violence: Election Violence around the World," 1, 38 (2018), <https://search.proquest.com/a1737002-9a63-4e1d-b52d-3bd23d8fb2aa>.

¹³ Jakkie Cilliers, "Violence in Africa Trends, Drivers and Prospects to 2023," (August 2018), <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ar-12.pdf>.

¹⁴ Ibid.

(OAU), yang selanjutnya dikenal sebagai Uni Afrika (AU).¹⁵ AU adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 55 anggota negara-negara di Benua Afrika.¹⁶ Tujuan utama AU sendiri adalah untuk mencapai persatuan dan solidaritas yang lebih baik antara negara-negara Afrika dan masyarakat Afrika. Selain itu, AU juga bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas benua, untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat, serta hal-hal lainnya yang terkait hak asasi manusia.¹⁷ Dalam menjalankan tugasnya, AU berpegang pada konstitusinya, yaitu Constitutive Act of AU.

Sebagai benua yang memiliki banyak konflik, Afrika dituntut untuk memberikan upaya yang besar dalam pencegahan hingga resolusi konflik agar benuanya dapat bergerak kepada integrasi, stabilitas politik serta pertumbuhan ekonomi yang baik. Dalam hal ini, AU sebagai organisasi regional terbesar di Afrika dihadapkan dengan harapan besar dalam memberikan jalan keluar terhadap penyelesaian konflik-konflik yang tersebar di berbagai negara di Afrika. Penyelesaian konflik dan pelanggaran HAM di negara-negara Afrika ini tak lepas dari peran organisasi secara penuh mulai dari upaya penanganan konflik secara damai hingga pelaksanaan intervensi militer. Hal ini pula yang berusaha dilakukan AU dengan

¹⁵ Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, and Kendall W. Stiles, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2015).

¹⁶ African Union, "About the African Union," diakses Februari 2019, <https://au.int/en/overview>

¹⁷ African Union, "AU in a Nutshell," diakses Februari 2019, <https://au.int/en/au-nutshell>.

menggunakan otoritas serta kapabilitasnya sebagai organisasi yang menaungi negara-negara di Afrika.

Peran organisasi ini dalam penyelesaian konflik di negara-negara Afrika di mulai pada tahun 1990 ketika benua tersebut dilanda banyak krisis. Pada tahun tersebut, ada sekitar 20 perang yang terjadi secara bersamaan di negara-negara di Afrika, seperti Sudan, Rwanda, Burundi, Liberia, Republik Demokratik Kongo, Somalia, Sierra-Leone, Angola, dan lain-lain. Krisis politik berlangsung di negara-negara tersebut dan mengancam kelangsungan politik serta stabilitas kawasan. Sayangnya, OAU pada saat itu tidak dapat melakukan intervensi ke negara anggotanya karena dihalangi oleh prinsip non-interferensi yang diterapkan dalam konsitusinya. Namun, setelah terjadinya genosida di Rwanda, prinsip tersebut dihapus dan OAU pun diubah menjadi AU. Sejak saat itu, AU telah memberikan banyak kontribusi untuk manajemen konflik di Afrika. AU telah melakukan intervensi secara tegas dalam penyelesaian konflik di Burundi, Komoro, Sudan, dan Somalia. AU juga melakukan peran penting dalam proses perdamaian di Liberia, Sierra-Leon, DRC, Mozambik, Libya, Pantai Gading, dan negara-negara berkonflik lainnya.¹⁸ Selain melakukan penanganan konflik secara damai melalui mediasi, AU juga meningkatkan upayanya dengan melakukan pengiriman misi ke dalam negara-negara yang berkonflik.

¹⁸ Silk Ugwu Ogbu, "African Union and Conflict Management in Africa: The Role of Communication in the Effectiveness of Future Interventions," *International Journal of African Society, Cultures and Traditions* 5, no.1 (2017): 14-16.

Misi pertama AU dikerahkan di Burundi ketika terjadi kekerasan etnis antara kelompok mayoritas Hutu dan kelompok minoritas Tutsi. Misi ini dilaksanakan dalam bentuk peluncuran Operasi Perdamaian di Burundi (AMIB) akibat kegagalan Perjanjian Arusha untuk Burundi yang ditandatangani pada tahun 2000 untuk mengkonsolidasikan proses perdamaian di negara itu dan perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani dua tahun setelahnya yang juga tidak membuahkan hasil dalam penyelesaian konflik. Adapun misi ini digambarkan sebagai salah satu kesuksesan terbesar AU. Pada akhir misi AMIB di tahun 2004, perdamaian dipulihkan ke mayoritas wilayah Burundi, kecuali wilayah di luar ibu kotanya, Bujumbura yang merupakan tempat pasukan pembebasan nasional bersenjata.¹⁹

Namun, terlepas dari cerita kesuksesan tersebut, terdapat perbedaan antara kapasitas AU seperti yang dilaporkan dengan dampak sebenarnya yang terjadi dalam situasi krisis. Dalam pengerahan misi AMIB, rintangan yang dihadapi AU adalah adanya peralatan yang tidak memadai, makanan dan obat-obatan. Selain itu, permasalahan terkait peran AU dalam penyelesaian konflik juga terjadi di seluruh upaya penanganan konflik melalui pengerahan misi yang dilakukannya di negara-negara anggotanya.²⁰ Dalam pelaksanaan misinya, AU menghadapi banyak kendala

¹⁹ Ibid.

²⁰ Chika Njideka Ogounu dan Christian Chukwuebuka Ezeibe, "African Union and Conflict Resolution in Africa," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 5, No. 27 (2014): 329-330.

yang seringkali menggagalkan upayanya untuk membantu negara-negara anggotanya yang sedang berada dalam konflik.

Pengerahan misi oleh AU memiliki berbagai keterbatasan dan tantangan yang serupa. Pada dasarnya, AU tidak mampu untuk fokus secara efektif pada lebih dari satu masalah dalam satu waktu. Ketika AU berusaha untuk memperbaiki stabilitas politik di benuanya, AU dihalangi oleh kemiskinan ekstrem yang menghambat kemampuan finansialnya yang didapat dari iuran anggota. Beberapa negara bahkan terlalu miskin dan bermasalah secara internal oleh konflik mereka sendiri sehingga tidak mampu berpartisipasi dalam upaya AU menangani konflik negara lain. Akibatnya, AU memiliki masalah kepemimpinan dan manajemen yang buruk dalam penyelesaian konflik. Hal ini menyebabkan kredibilitas, wewenang dan keandalan AU dalam penyelesaian konflik yang terjadi di negara anggotanya pun menjadi dipertanyakan.²¹

1.2 Identifikasi Masalah

Konflik kekerasan politik di Afrika saat ini dapat terlihat di Burundi. Awalnya, konflik ini dilatarbelakangi oleh adanya aksi demonstrasi atas menjatuhnya kembali Presiden Pierre Nkurunziza untuk ketiga kalinya pada bulan April 2015.²² Hal ini melanggar Persetujuan Arusha yang dianggap rakyat Burundi sebagai pedoman dalam

²¹ Ibid.

²² Juho Takkunen, "Local Conceptualisations of Violence and Dialogue in Burundi's Post-electoral Crisis," (June 2017), <https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101713/GRADU-1499329511.pdf?sequence=1>.

rekonsiliasi dan perdamaian pasca perang-saudara yang berlangsung selama lebih dari 10 tahun.²³ Selain itu, dalam konstitusi Burundi tercantum bahwa presiden hanya dapat menjabat paling banyak dua kali berturut-turut.²⁴ Melihat hal tersebut, kembalinya Nkurunziza sebagai presiden dapat dikatakan sebagai sesuatu yang ilegal.

Nkurunziza pertama kali dipilih pada tahun 2005 oleh parlemen untuk mengakhiri perang saudara di negara tersebut. Ia kembali terpilih melalui pemilihan umum pada tahun 2010. Mengacu pada hal tersebut, Nkurunziza tidak mempertimbangkan masa jabatan pertamanya pada tahun 2005 karena dianggap tidak berdasarkan hasil pemilihan umum. Ini kemudian menjadi dasar keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan umum tahun 2015.²⁵ Interpretasi yang berbeda dari ketentuan konstitusi ini pula yang kemudian menjadi salah satu pemicu dari krisis politik negara.

Selain itu, Nkurunziza juga membentuk komisi untuk mengusulkan revisi atas konstitusi Burundi yang mengatur soal syarat pengajuan dan pemilihan presiden.²⁶ Ini dilakukannya tak lama setelah kembali terpilihnya ia sebagai presiden. Melalui referendum Mei 2018, lebih dari 73% rakyat menyetujui perubahan konstitusi yang

²³ Jessica Hatcher-Moore, "Burundi Elections: Pierre Nkurunziza Set to Win Disputed Third Term as President," 21 Juli 2015, diakses February 16, 2019, <https://www.theguardian.com/world/2015/jul/21/burundi-elections-pierre-nkurunziza-set-win-third-term>.

²⁴ BBC News, "Burundi Elections: Pierre Nkurunziza Wins Third Term," 24 Juli 2015, diakses Februari 2019, <https://www.bbc.com/news/world-africa-33658796>.

²⁵ AfricaNews, "Nkurunziza Eyes Another Term through Anticipated Constitutional Reform," Africanews, 13 Mei 2017, diakses Februari 2019, <http://www.africanews.com/2017/05/13/nkurunziza-eyes-another-term-through-anticipated-constitutional-reform/>

²⁶ Ibid.

memperpanjang masa jabatan presiden dari lima tahun menjadi tujuh tahun tersebut.²⁷ Akibatnya, serangkaian perlawanan politik pun tidak dapat dihindari. Hal ini mencakup protes jalanan, percobaan kudeta, dan serangan oleh kelompok pemberontak.²⁸ Hingga April 2016, terdapat 1.155 korban jiwa, di mana 690 orang dari jumlah tersebut adalah warga sipil.²⁹ Selain itu, jumlah pengungsi Burundi pun terhitung tinggi merespon konflik yang ada. Lebih dari 400.000 warga Burundi meninggalkan negaranya sejak tahun 2015 dan memilih untuk tetap berada di luar negeri. Sebagian besar dari mereka ada di Tanzania, Rwanda, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo.³⁰ Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah Burundi gagal memberikan rasa memiliki dan keamanan kepada rakyatnya.

Namun begitu, respon negara terkait penyebaran konflik bertolakbelakang dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Dalam pidato inaugurasinya, Nkurunziza berjanji akan menyelesaikan konflik kekerasan dalam waktu dua bulan.³¹ Tapi, hal ini tidak diikuti dengan tindakan nyata. Konflik terus berlanjut dan pemerintah Burundi kembali dengan janji bahwa tidak akan ada eskalasi konflik ke ancaman genosida.³²

²⁷ The New York Times, "Burundi's President Says He Won't Seek Another Term," 8 Juni 2018, diakses Februari 2019, <https://www.nytimes.com/2018/06/07/world/africa/burundi-president-pierre-nkurunziza.html>.

²⁸ Jessica Hatcher-Moore, "Burundi Elections: Pierre Nkurunziza Set to Win Disputed Third Term as President."

²⁹ Armed Conflict Location & Event Dataset, "Burundi Report: Burundi Crisis Year One," (Mei 2016), https://www.jstor.org/stable/resrep03792?seq=1#metadata_info_tab_contents

³⁰ Human Rights Watch, "World Report 2018: Rights Trends in Burundi," 18 Januari 2018, diakses Februari 2019, <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/burundi>

³¹ BBC News, "Burundi President Pierre Nkurunziza Sworn in for Third Term," 20 Agustus 2015, diakses Februari 2019, <https://www.bbc.com/news/world-africa-34000420>

³² BBC News, "Burundi Crisis: Pierre Nkurunziza Threatens to Fight AU Peacekeepers," 30 Desember 2015, diakses Februari 2019, <https://www.bbc.com/news/world-africa-35198897>

Bahkan, di tahun 2017, muncul klaim dari pemerintah bahwa negara tersebut sedang berada dalam keadaan “damai”.³³ Adanya respon pemerintah Burundi di bawah Nkurunziza yang seolah menyembunyikan konflik yang terjadi menunjukkan urgensi perlunya campur tangan pihak luar untuk mengatasi konflik tersebut. Adapun AU merupakan pihak luar yang dalam konstitusinya bertanggungjawab dan memiliki kredibilitas untuk menyelesaikan konflik di Burundi.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, maka demi efisiensi dan kegunaannya, masalah yang akan diteliti oleh penulis hanya pada peran Uni Afrika dalam mengatasi konflik di Burundi. Penulis akan lebih memfokuskan pada tahapan upaya penanganan konflik di Burundi yang dilakukan oleh AU.

AU merupakan organisasi internasional yang memiliki pendekatan regionalisme yang memiliki tujuan untuk mencapai kesatuan dan solidaritas yang lebih besar di antara negara-negara Afrika dan masyarakat Afrika, untuk mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas benua, untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat dan hal lainnya

³³ Human Rights Watch, "World Report 2018: Rights Trends in Burundi."

yang relevan dengan instrumen hak asasi manusia.³⁴ Mengacu pada hal tersebut, penulis ingin mengetahui peran AU dalam mengatasi konflik di Burundi berdasarkan konstitusinya.

Penulis membatasi rentang waktu penelitian mulai dari pada April 2015 hingga Januari 2016. Rentang waktu ini diambil oleh penulis karena April 2015 merupakan waktu di mana pencalonan Pierre Nkurunziza sebagai presiden untuk periode ketiganya terjadi. Sementara itu, Januari 2016 merupakan waktu di mana konflik menunjukkan penurunan secara drastis untuk sementara karena upaya penanganan yang dilakukan oleh AU.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan diajukan oleh penulis ialah:

“Bagaimana peran Uni Afrika dalam mengatasi konflik di Burundi dalam kurun waktu April 2015 – Januari 2016?”

³⁴ African Union, "AU in a Nutshell," diakses Februari 2019, <https://au.int/en/au-nutshell>

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana peran AU dalam mengatasi konflik di Burundi dalam kurun waktu April 2015 – Januari 2016.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk memberi sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan studi hubungan internasional.

1.4 Kajian Literatur

Urgensi pelaksanaan intervensi kemanusiaan dalam penyelesaian konflik di Burundi perlu memiliki dasar serta pelaku yang jelas. Sejumlah literatur yang digunakan penulis akan berkontribusi dalam menjelaskan mengenai hal tersebut. Literatur pertama berjudul *The African Union's Right of Humanitarian Intervention as Collective Self-Defense*. Dalam literatur ini dijelaskan bahwa AU memiliki hak untuk melakukan intervensi kemanusiaan apabila terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.³⁵

³⁵ Christian Wyse, "The African Union's Right of Humanitarian Intervention as Collective Self-Defense," *Chicago Journal of International Law*, 2019.

Meski begitu, agenda ini harus dijalankan sesuai dengan kerangka terkait keamanan yang dimiliki oleh PBB. Kerangka ini tercantum dalam Piagam PBB pasal 51 dan mengatur tentang ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional sehingga dibutuhkan *collective self-defense*.³⁶ Dengan demikian, intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh AU akan menjadi sebuah tindakan respon terhadap konflik yang sebanding dan memang diperlukan.

Pada kenyataannya, AU sudah melakukan peran lewat upaya mediasi dan diplomasi melalui instrumen diplomatik dan operasi perdamaian di Burundi.³⁷ Hal ini tercantum dalam literatur berjudul *African Union and Conflict Resolution in Africa*.

Namun lebih dari itu, AU adalah organisasi internasional dengan lingkup benua Afrika yang bertanggung jawab untuk menaungi negara-negara anggotanya. Terlepas dari upaya yang telah dilakukannya, AU tidak berhasil melakukan intervensi kemanusiaan yang dianggap sebagai cara yang sepadan untuk mengatasi krisis politik Burundi. Literatur berjudul *AU and Coercive Diplomacy: The Case of Burundi* membahas tentang kredibilitas AU sebagai pihak yang seharusnya paling berperan dalam penyelesaian krisis politik ini.³⁸

³⁶ Ibid.

³⁷ Christian Ezeibe, "African Union and Conflict Resolution in Africa," *Mediterranean Journal of Social Sciences*, (December 2014), https://www.researchgate.net/profile/Christian_Ezeibe/publication/280155915_African_Union_and_Conflict_Resolution_in_Africa/links/5c30bde4299bf12be3af9d5c/African-Union-and-Conflict-Resolution-in-Africa.pdf?origin=publication_detail

³⁸ Nina Wilen dan Paul D. Williams, "The African Union and Coercive Diplomacy: The Case of Burundi," <http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2018/12/Accepted-Manuscript-AU-and-Coercive-Diplomacy-the-Case-of-Burundi.pdf>

Secara mendalam, literatur ini menjelaskan mengenai alasan dibatalkannya aksi intervensi kemanusiaan di Burundi. Selain itu, adanya penolakan dari sejumlah pemimpin negara untuk melakukan intervensi kemanusiaan karena dianggap akan memicu munculnya intervensi-intervensi lainnya di kemudian hari turut menjadi alasan mengapa intervensi kemanusiaan ini dibatalkan. Masih banyak pemimpin negara yang mengkhawatirkan perlindungan terhadap warga negara dan juga urusan kedaulatan negara yang diintervensi.³⁹

Selain mengacu pada pasal 4 konstitusi AU, kebutuhan intervensi kemanusiaan dalam perwujudan keamanan dan perdamaian internasional dijelaskan pula dalam Piagam PBB pasal 51. Kenyataannya, AU sebagai organisasi internasional yang memiliki kredibilitas untuk mengatasi konflik hanya melakukan peran melalui mediasi dan diplomasi. Hal ini dapat dilihat dalam gagalnya pengerahan operasi militer di Burundi. Agenda ini sebenarnya sudah dicanangkan oleh AU. Namun begitu, karena beberapa alasan, pelaksanaannya dibatalkan.

Dari ketiga literatur di atas, penulis menemukan bahwa tulisan-tulisan terkait penanganan konflik Burundi meliputi tindakan respon seperti apa yang harus dilakukan AU guna menangani kasus tersebut sebagai sebuah organisasi internasional yang memiliki kredibilitas. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan yang belum

³⁹ Ibid.

dijelaskan dalam ketiga literatur tersebut, yaitu mengenai bagaimana peran AU dalam menangani krisis politik di Burundi lewat upaya-upaya yang dilakukannya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup bersama orang lain. Manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sulit untuk dipenuhi apabila hanya mengandalkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, demi kelangsungan hidupnya manusia membina hubungan dan menjalin interaksi dalam bermacam-macam komunitas atau kelompok-kelompok sosial.

Gagasan manusia sebagai makhluk sosial ini sejalan dengan pemikiran Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia harus hidup dalam komunitas karena manusia adalah makhluk politik atau *zoon politikon*. Salah satu bentuk dari komunitas ini adalah negara. Adapun negara dapat didefinisikan sebagai suatu komunitas yang terdiri dari kumpulan masyarakat yang secara politis diatur di bawah satu pemerintahan independen dalam wilayah tertentu.⁴⁰

Negara menjadi wadah bagi manusia untuk membangun kehidupan dengan harapan akan memperoleh kebutuhan-kebutuhan mereka. Robert Jackson dan Georg Sørensen dalam bukunya menjelaskan bahwa setidaknya ada lima nilai sosial dasar

⁴⁰ "Concept and Meaning of State,"
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/55344/8/08_chapter_2.pdf

yang mewakili kebutuhan-kebutuhan manusia, yaitu *security, freedom, order, justice*, dan *welfare*. Nilai-nilai ini dianggap penting untuk kesejahteraan manusia sehingga perlu dijamin dan dilindungi dengan cara apapun.⁴¹ Apabila tidak terpenuhi, negara akan mengalami ketidakstabilan.

Dengan demikian, negara akan dikatakan tidak berhasil dalam menyediakan kenyamanan yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Negara, terkhusus pemerintah akan kehilangan legitimasi sebagai suatu sistem komunitas yang sah. Meski begitu, jatuhnya bangunya negara bukanlah hal yang baru. Di era modern dengan fondasi sistem internasional yang resmi sekarang, negara-negara kemudian terlibat pula melalui institusi internasional dalam penyelesaian ketidakstabilan yang terjadi di negara berkonflik.

Ini sejalan dengan teori liberal-institusionalisme. Setelah dua perang dunia berakhir, dunia mulai mendapatkan kesejahteraan sejak adanya pembentukan institusi-institusi internasional. Menurut Andrew Heiss dan Tana Johnson, dunia seolah merehabilitasi dan menebus kesalahan-kesalahannya melalui kerja sama.⁴² Dengan demikian, teori ini menjelaskan bahwa institusi internasional turut berperan dalam menciptakan dan menjaga perdamaian.

⁴¹ Robert H. Jackson, Georg Sørensen, dan Jørgen Møller, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford: Oxford University Press, 2018)

⁴² Tana Johnson and Andrew Heiss, "Chapter 9 Liberal Institutionalism," *International Organization and Global Governance*, 2nd ed. (London: Routledge, 2018).

Institusi internasional diciptakan sebagai respon terhadap kepentingan negara untuk wilayahnya. John J. Mearsheimer mengatakan bahwa dalam politik dunia yang kompleks, kehadiran institusi internasional penting demi menjalin kerja sama yang menghasilkan manfaat bagi negara anggota. Teori ini mengklaim bahwa kerja sama antar negara akan mencegah kemungkinan terjadinya perang. Dalam teori liberal institusionalisme, salah satu tujuan utama dari institusi internasional ialah untuk membuat seperangkat aturan yang dapat memaksa negara anggota untuk melakukan tindakan tertentu. Oleh karena itu, institusi internasional hanya dapat bergerak dengan mengambil sebagian kedaulatan dari negara.⁴³ Hal ini kemudian menjadi tantangan dari keberadaan dan efektivitasnya.

Oleh karena itu, teori liberal-institusionalisme berpendapat bahwa adanya kepentingan yang serupa di antara negara-negara yang terlibat kerja sama akan membantu untuk mengatasi tantangan terkait kedaulatan. Negara dianggap sebagai aktor rasional yang kepentingannya ialah memperoleh keuntungan melalui kerja sama. Berdasarkan asumsi ini, institusi internasional mampu menjadi perantara yang menyatukan berbagai kepentingan dengan berperan dalam perumusan pilihan kebijakan negara.⁴⁴

⁴³ John J. Mearsheimer, "The False Promise of International Institutions," *International Security* 19, no. 3 (1994-1995): 14.

⁴⁴ Mohammed Nuruzzaman, "Liberal Institutionalism and International Cooperation after 11 September 2001," *International Studies*, (July 2008), doi:10.1177/002088170904500302.

Dalam pelaksanaannya, institusi internasional hadir dalam berbagai bentuk yang disusun berdasarkan hukum atau tradisi manusia, seperti perdagangan, diplomasi, konferensi, maupun organisasi internasional. Penulis akan menggunakan bentuk organisasi internasional untuk menjelaskan tentang kerja sama melalui institusi internasional. Organisasi internasional dalam konteks ini merujuk pada sistem formal yang memiliki seperangkat peraturan dan tujuan. Hal ini mencakup konstitusi, peralatan fisik, administrasi yang hierarkis, staf, logo, kop surat, dan lain-lain.⁴⁵

Dalam menjalankan tugasnya, organisasi internasional memiliki peran yang harus dipenuhi. Adapun peran-peran ini mencakup instrumen, arena, dan aktor. Peran pertama mengacu pada organisasi internasional sebagai instrumen yang digunakan anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu. Peran selanjutnya menuntut organisasi internasional untuk menjadi arena atau forum di mana diskusi, debat, dan kerja sama dilakukan. Ia memaparkan bahwa organisasi internasional berperan sebagai sebuah forum di mana terdapat pertemuan bagi anggota untuk berdiskusi, berdebat, bekerja sama, hingga bertentangan mengenai pendapat antara satu dengan yang lain. Peran organisasi internasional sebagai arena tidak hanya mengacu pada bagaimana ia digunakan sebagai sebuah forum oleh para anggotanya. Lebih dari itu, terdapat pemanfaatan organisasi internasional sebagai arena untuk melakukan upaya penguatan diplomatik bagi kebijakan negara yang memiliki kepentingan.

⁴⁵ Clive Archer, *International Organizations* (London: Routledge, 2015)

Peran terakhir ialah organisasi internasional berperan sebagai aktor independen yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang stabil. Dalam bukunya, Archer mengutip istilah ‘gagasan fiktif’ yang merujuk pada organisasi internasional dan anggapan yang juga tercantum dalam konstitusinya bahwa organisasi internasional adalah suatu entitas yang lebih dari komponen-komponen yang membuatnya berdiri, yaitu negara-negara berdaulat. Oleh karena itu, organisasi internasional dibentuk sebagai bentuk perjanjian tingkat kelembagaan untuk melakukan aktivitas negara secara multilateral dalam bidang tertentu dan batasan tertentu pula. Peran terakhir ialah organisasi internasional sebagai aktor independen yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang stabil. Kapasitas aktor dari sebuah organisasi internasional salah satunya bergantung pada perintah yang dikeluarkan dari organnya yang dapat memaksa anggota untuk bertindak di luar keinginan mereka. Secara garis besar, organisasi internasional disebut sebagai aktor apabila ia menjadi sebuah entitas yang terpisah dari anggotanya. Arnold Wolfers dalam buku *International Organisations* yang ditulis oleh Clive Archer menyatakan bahwa ketika sejumlah entitas non-negara, termasuk organisasi internasional dapat mempengaruhi jalannya sebuah peristiwa dunia, entitas tersebut berperan sebagai aktor dalam arena internasional. Keberadaan organisasi dan kekuatan lembaganya diukur dari kemampuannya dalam membuat keputusan sendiri, bertindak bertentangan dengan keinginan beberapa anggota dan mempengaruhi tindakan anggota lainnya. Selain itu, hal ini juga dapat dilihat dari seberapa jauh organisasi internasional baik secara kolektif maupun individual memberikan pengaruh pada sistem internasional.⁴⁶ Peran-

⁴⁶ Clive Archer, *International Organizations* (London: Routledge, 2015)

peran ini dijadikan tolak ukur dari keberhasilan organisasi internasional, termasuk AU. Penulis akan menggunakan peran instrumen, arena, dan aktor untuk menganalisis bagaimana AU mengatasi konflik di Burundi.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif di mana penulisan akan berusaha mengeksplorasi dan memahami keterkaitan suatu kelompok dengan masalah sosial.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data akan dilakukan melalui studi literatur⁴⁷ dan internet.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I

⁴⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Amerika Serikat: SAGE Publication, 2014).

Bab I berisi pendahuluan dalam penelitian ini. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II

Bab II akan membahas mengenai organisasi internasional AU. Di dalamnya akan terdapat penjelasan terkait sejarah pembentukannya, dasar konstitusinya, serta stabilitasnya.

Bab III

Bab III akan menjabarkan mengenai konflik di Burundi yang dimulai pada tahun 2015. Pada bab ini, penulis juga akan membahas tentang awal masuknya AU dalam konflik tersebut dan akan menjabarkan tentang peran AU dalam menangani krisis politik di Burundi.

Bab IV

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

